

**PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI TERHADAP KETERANDALAN DAN KETEPATWAKTUAN PELAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN VARIABEL INTERVENING
PENGENDALIAN INTERN AKUNTANSI.**

**Oleh Drs. FX. Sri Wardaya, MM
Yusup Hari Subagya, SE, MM**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh antara sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening pengendalian intern akuntansi.

Sampel penelitian adalah pejabat pemerintah daerah di lingkungan instansi pemerintah daerah yang terdiri dari badan, dinas dan kantor. Data penelitian dikumpulkan dari pemerintah daerah Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten. Metode pengambilan data dilakukan dengan *purposive sampling* melalui survey.

Model pertama dengan *path analysis* yang digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh positif signifikan antara sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan melalui pengendalian intern akuntansi. Sedangkan model kedua dengan uji regresi untuk menguji apakah sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan terhadap keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan.

Kata kunci: Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi, Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan

ABSTRACT

This study aims to clarify the effect of human resources and utilization of information technology and the reliability of financial reporting ketepatanwaktuan local governments and the intervening variable of the accounting internal control. The samples are within the local government officials of local government consisting of the bodies, agencies and offices. The research data were collected from local governments Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen and Klaten. Methods of data collection is done by purposive sampling through survey.

The first model with path analysis used to test whether there is a significant positive effect of human resources and utilization of information technology on the reliability of financial reporting through accounting internal controls.

Whereas the second model with a regression test to test whether human resources, utilization of information technology and accounting internal controls and significant effect on the reliability of financial reporting timeliness.

Key words: *Human Resources, Information Technology, Accounting Internal Control, Financial Reporting Countability and timeliness.*

1. Pendahuluan

1. 1. Latar Belakang Masalah

Semakin pentingnya teknologi informasi bagi keberhasilan organisasi secara keseluruhan memperluas peran fungsi sistem informasi. Pentingnya penggunaan teknologi informasi tidak hanya didominasi oleh institusi swasta, tetapi juga sudah merambah ke instansi pemerintah. Adanya *e-government*, *e-procurement*, *e-transaction* dan aktivitas melalui teknologi informasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya maupun antara pemerintah di negeri ini dengan pemerintah di negara lainnya merupakan implementasi penggunaan teknologi informasi di instansi pemerintah. Selain itu, dengan adanya penggunaan Teknologi informasi, maka penyelenggaraan negara menuju *value for money* (ekonomis, efisien dan efektif) serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat semakin mengalami peningkatan menuju upaya yang optimal. Adanya penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintah, otomatis juga menuntut aparatur harus mengubah dalam menyelesaikan pekerjaannya dari semula manual menuju komputerisasi. (Hamzah, 2009)

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Mardiasmo, 2006).

Untuk menegakkan akuntabilitas finansial khususnya di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada *stakeholder*. *Governmental Accounting Standards Board* (1999) dalam *Concepts Statement No. 1* tentang *Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang

didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya.

Banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai sama dengan mengatakan bahwa informasi harus mempunyai nilai (Suwardjono, 2005). Informasi akan bermanfaat kalau informasi tersebut dipahami dan digunakan oleh pemakai dan juga bermanfaat kalau pemakai mempercayai informasi tersebut.

Kebermanfaatan merupakan suatu karakteristik yang hanya dapat ditentukan secara kualitatif dalam hubungannya dengan keputusan, pemakai dan keyakinan pemakai terhadap informasi. Kriteria ini secara umum disebut karakteristik kualitatif (*qualitative characteristics*) atau kualitas (*qualities*) informasi. Kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat yang disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (PP No. 24 Tahun 2005) terdiri dari: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan dan (d) dapat dipahami.

Lebih dari 10 tahun terakhir ini ada sebuah peningkatan pada bagian-bagian di lembaga publik, disemua negara, untuk mengadopsi teknik yang sudah secara luas digunakan oleh perusahaan profit. Di Yunani, usaha awal memperkenalkan akuntansi akrual di negara bagian dilakukan akhir tahun 1996 dan dikembangkan pada tahun 1999. Pengenalan akuntansi akrual dalam sektor publik biasanya bertujuan untuk menyediakan pengukuran dan komunikasi yang lebih akurat, posisi dan performa keuangan serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi (Pallot, 1997 dan Van Der Hoek, 2005 dalam Cohen, 2007).

Sistem akuntansi akrual digunakan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi publik serta manajemen aset dan sumber daya yang efektif yang akhirnya mempengaruhi kinerja. Manfaat tersebut dapat dinikmati dengan melakukan investasi pada sumber daya melalui teknologi baru dan software baru, peningkatan keahlian akuntansi, pelatihan dan lain-lain.

Persoalan awal ketika berpindah dari akuntansi berbasis kas menuju akuntansi berbasis akrual adalah sebagai berikut: Kelompok pertama mengacu pada isu-isu pokok akuntansi seperti standar dan perlakuan akuntansi yang berasal dari fakta bahwa perbedaan-perbedaan antara sektor publik dan privat diabaikan dan sektor publik dipaksa untuk mengadopsi praktek pelaporan keuangan yang hampir identik dengan yang digunakan oleh sektor privat. Kelompok kedua mengacu pada hambatan yang berhubungan dengan ukuran dan masalah organisasional yang muncul karena keterbatasan sumber daya dan pengetahuan. Penggunaan akuntansi akrual biasanya menciptakan kebutuhan untuk melatih staf dan manajemen yang akan mengoperasikan sistem baru.

Jika persoalan tersebut di atas tidak diatasi, penggunaan sistem akuntansi berbasis akrual akan terhambat. Menurut bukti empiris, ketidaktersediaan sumber daya terlatih diiringi ketrampilan dan keahlian yang minimal, tidak adanya insentif bagi penggunaan akuntansi akrual, sedikitnya staf dan software yang layak untuk menerapkan akuntansi akrual atau untuk menggunakan berbagai informasi yang disediakan dalam tatanan yang rapi dan terorganisir, kurangnya dukungan akuntan atau auditor yang profesional secara sistematis merupakan hambatan terhadap modernisasi sistem akuntansi publik. (Cohen, 2007).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagai dasar pengelolaan teknis keuangan daerah mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 memberikan masa transisi untuk perubahan dari *cash basis* ke *accrual basis* dalam waktu 5 tahun (sampai tahun 2008). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diterapkan saat ini harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005, yaitu menggunakan basis modifikasi kas menuju akrual. Basis ini mengharuskan penyajian akun aset, kewajiban dan ekuitas dengan basis akrual, sedangkan akun pendapatan, belanja dan pembiayaan menggunakan basis kas.

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kenyataannya di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai. Selain itu juga masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Menurut Mardiasmo, dalam Pasal 33 UU No 33/2004 disebutkan bahwa Menteri Keuangan berhak menunda penyaluran DAU bila pemda belum menyerahkan laporan sistem keuangan daerah, termasuk APBD. Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Agung Pambudhi mendukung kebijakan Depkeu tersebut. Setidaknya terdapat tiga alasan yang dapat dijadikan dasar sanksi tersebut: (1) UU No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah (2) faktor koordinasi nasional, yaitu kondisi pelaporan perda APBD yang sering terlambat sehingga mengganggu perekonomian nasional (3) faktor kepentingan daerah.

Berdasarkan fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah masih belum seluruhnya memenuhi kriteria keterandalan dan ketepatanwaktuan (*timeliness*). Keterandalan dan ketepatanwaktuan merupakan dua unsur nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak, maka peneliti tertarik untuk meneliti hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah.

Di dalam Konsep Standar Pemeriksaan Keuangan Negara pada bab Standar Pekerjaan Lapangan Pemeriksaan Keuangan mengenai Pengendalian Intern disebutkan bahwa sistem informasi yang relevan dengan tujuan laporan keuangan,

salah satunya adalah sistem akuntansi yang terdiri dari metoda dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, mengihktisarkan dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) untuk memelihara akuntabilitas bagi aktiva, utang dan ekuitas yang bersangkutan (BPK RI, 2006). Sistem akuntansi sebagai suatu sistem informasi membutuhkan manusia untuk menjalankan sistem yang ada. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting.

Penelitian Cohen *et al.* (2007) menyatakan bahwa sistem/teknologi informasi yang dimiliki pemerintah daerah di Yunani belum begitu baik. Faktor-faktor yang mendukung kegagalan teknologi informasi yaitu: (a) Pengetahuan tentang akuntansi bukan suatu prasyarat untuk staf yang bekerja di dalam departemen akuntansi sektor publik di Yunani. (b) Mayoritas karyawan bagian keuangan dari kotamadya-kotamadya tidak mempunyai kualifikasi akuntansi profesional, atau pengalaman untuk memahami baik buruknya reformasi.

Menurut Indriantoro dan Supomo (2002) variabel moderating adalah variabel-variabel yang memperkuat / memperlemah hubungan langsung antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen. Variabel moderating merupakan tipe variabel yang mempunyai pengaruh terhadap sifat/arah hubungan antara variabel (Indriantoro & Supomo, 2002). Sedangkan variabel intervening adalah tipe variabel yang mempunyai hubungan independen dengan variabel-variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung (Indriantoro&Supomo, 2002). Selanjutnya, Indriantoro & Supomo (2002) menyatakan bahwa variabel intervening merupakan variabel yang terletak diantara variabel-variabel independen dengan variabel-variabel dependen, sehingga variabel independen tidak langsung menjelaskan/ mempengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian ini, untuk mengevaluasi hubungan antara sumber daya manusia & pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan memilih pengendalian akuntansi sebagai variabel intervening.

Pengendalian intern menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Ada tiga fungsi yang terlihat dari definisi tersebut yaitu: (a) keterandalan pelaporan keuangan, (b) efisiensi dan efektivitas operasi, dan (c) kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi pertama dilakukan untuk mencegah terjadinya inefisiensi dan dinamakan pengendalian intern akuntansi, sedangkan fungsi kedua dan ketiga dilakukan secara khusus untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dan dinamakan pengendalian intern administratif (Moscove *et al.*, 1990

dalam Triyuwono & Roekhudin, 2000). Komponen penting dari pengendalian intern organisasi yang terkait dengan sistem akuntansi antara lain (Mahmudi, 2007): (a) sistem dan prosedur akuntansi, (b) otorisasi, (c) formulir, dokumen, dan catatan, dan (d) pemisahan tugas.

Menurut tujuannya, pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua yaitu pengendalian intern akuntansi (*internal accounting control*) dan pengendalian intern administratif (*internal administrative control*). Pengendalian intern akuntansi yang merupakan bagian dari pengendalian intern yang berkaitan dengan menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian serta keterandalan data akuntansi, sedangkan pengendalian intern administratif berkaitan dengan mendorong efisiensi, dan dipatuhinya kebijakan pimpinan. (Wilkinson *et al.*, 2000).

Tujuan Khusus

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh antara sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening pengendalian intern akuntansi. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Menjelaskan hubungan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap **keterandalan** pelaporan keuangan pemerintah daerah.
- b. Menjelaskan hubungan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian akuntansi terhadap **ketepatanwaktuan** pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Urgensi Penelitian

- a. Model yang dikonstruksi dalam penelitian ini merupakan model kompilasi yang diuji dengan prosedur yang *rigid* sehingga keakuratan prediksinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- b. Metode riset yang dikembangkan dalam penelitian ini berlatarbelakang isu-isu pokok akuntansi seperti standar dan perlakuan akuntansi yang berasal dari fakta bahwa sektor publik dipaksa untuk mengadopsi praktek pelaporan keuangan yang hampir identik dengan yang digunakan oleh sektor swasta, dan juga masalah organisasional yang muncul karena keterbatasan sumber daya dan pengetahuan. Hal ini yang diperkirakan menjadikan penelitian ini mempunyai keunikan yang dapat memberikan perspektif yang berbeda dalam penelitian-penelitian di bidang akuntansi sektor publik.
- c. Model yang dikembangkan dalam penelitian ini mengisyaratkan terdapatnya isu tanggungjawab pelaporan keuangan pemerintah daerah yang diekspresikan melalui hubungan antar variabel yang didesain dalam model yang berimplikasi pada pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Melalui penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman tentang sumber daya manusia,

pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan adanya rancangan pengendalian intern akuntansi yang memadai mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik yang akhirnya bermuara pada dihasilkannya laporan keuangan pemerintah daerah yang andal dan tepat waktu.

- d. Penelitian ini mengungkapkan isu pokok tentang pentingnya sumber daya manusia dan teknologi informasi di instansi pemerintah. Hal ini dianggap menarik untuk dikaji, sebab isu ini masih bersifat kontroversial yang diekspresikan dengan terjadinya divergensi hasil penelitian yang berdampak pada ketidakmampuannya untuk memberikan landasan yang kuat untuk menjelaskan segala fenomena yang terjadi di bidang akuntansi sektor publik (Stanbury, 2003 dalam Mardiasmo, 2006). Penelitian ini mencoba untuk memunculkan model alternatif yang diharapkan dapat menjelaskan fenomena yang terjadi dalam akuntansi sektor publik di Indonesia yang semakin kompleks melalui pendekatan dan metode yang disesuaikan dengan perkembangannya.
- e. Penelitian ini bertumpu pada pendekatan 2 (dua) model, yang pertama model konvensional dan model struktural yaitu dengan merepresentasikan variabel terukur yang saling berhubungan. Model yang kedua adalah *path model* yaitu menjelaskan hubungan antara variabel sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi dengan variabel intervening pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dianggap penting, sebab pendekatan ini diperkirakan berkemampuan untuk menjelaskan fenomena yang dimodelkan untuk membentuk pola hubungan antara sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi akan menghasilkan keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan model yang mempunyai daya prediksian yang tinggi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2. Kajian Pustaka dan Pengembangan

Hipotesis Kajian Pustaka

1. Sumber Daya Manusia

Kinerja sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitasnya harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*output*) dan hasil-hasil (*output*) dan hasil-hasil (*outcomes*).

Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Alimbudiono & Fidelis (2004), untuk menilai kinerja dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan

suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumber daya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan dan dari ketrampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2005). Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup dalam bekerja akan banyak menemui hambatan yang mengakibatkan pemborosan bahan, waktu dan tenaga.

Skill adalah kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu rangkaian tugas yang berkembang dari hasil pelatihan dan pengalaman. Menurut Hevesi (2005) *skill* seseorang tercermin dari seberapa baik seseorang dalam melaksanakan suatu kegiatan yang spesifik seperti mengoperasikan suatu peralatan, berkomunikasi efektif atau mengimplementasikan suatu strategi bisnis.

2. Teknologi Informasi (TI)

Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya. Pengolahan data menjadi suatu informasi dengan bantuan komputer jelas akan lebih meningkatkan nilai dari nilai informasi yang dihasilkan. Peningkatan nilai informasi tersebut seperti berikut: Informasi yang memiliki nilai tinggi adalah informasi yang disajikan dalam waktu yang cepat dan tepat. Untuk pemrosesan data manual biasanya berlaku bahwa semakin cepat waktu yang diinginkan untuk pemrosesan, maka biaya yang dibutuhkan akan semakin besar. Dengan bantuan komputer pengolahan data bisa diatur sedemikian rupa sehingga informasi dapat disajikan tepat waktu dan dengan biaya yang masih di bawah manfaat itu sendiri. Dengan kata lain, kita bisa mengatur pengolahan data sehingga manfaat ekonomis sebuah informasi dapat diperoleh secara maksimal. (Wahana Komputer, 2003).

Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson *et al.*, 2000). Teknologi informasi terdiri dari bagian utama yaitu teknologi

komputer dan perlengkapan komputer yang berfungsi untuk menerima data, menyimpan data dan mengolah data menjadi informasi, serta mencetak atau membuat dan mengkomunikasikan informasi tersebut. Sistem informasi yang menggunakan teknologi dengan cara dan alat manual dan mekanik disebut sistem informasi manual, sedangkan sistem informasi yang didominasi oleh alat elektronik disebut sistem informasi elektronik. Sistem informasi elektronik yang menggunakan komputer disebut sistem informasi berbasis komputer.

Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini. (Hamzah, 2009).

3. **Keterandalan (*Reliability*) dan Ketepatanwaktuan (*Timeliness*)**

Agar manfaat dan tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dapat dipenuhi maka informasi yang disajikan harus merupakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Informasi harus bermanfaat bagi para pemakai sama saja dengan mengatakan bahwa informasi harus mempunyai nilai (Suwardjono, 2005). Beberapa definisi dan rumusan kualitas informasi disajikan dalam tabel 1:

Tabel 1. Definisi dan Rumusan Kualitas Informasi

FASB (Suwardjono, 2005)	Wilkinson <i>et al.</i> , (2000)	PP No. 24 Tahun 2005
<p>Kriteria kebermanfaatan/kualitas informasi:</p> <p>1. Kualitas primer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keberpautan/relevansi <ul style="list-style-type: none"> ✓Nilai balikan ✓Nilai prediktif ✓Ketepatanwaktuan - Keterandalan/reliabilitas <ul style="list-style-type: none"> ✓Keterujian ✓Ketepatan penyimbolan <p>2. Kualitas sekunder</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keterbandingan - Konsistensi - Kenetralan 	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Informasi = Manfaat – Kos • Informasi bernilai jika dapat mengurangi ketidakpastian pengguna ketika berada dalam situasi keputusan tertentu. • Definisi kualitatif sulit diterapkan, karenanya perlu mempertimbangkan pendekatan kuantitatif salah satunya <i>information economics approach</i>. • Nilai informasi dipengaruhi oleh kualitas informasi yang melekat pada informasi, yaitu: relevan, akurat, tepat waktu, ringkas, jelas, dapat dikuantifikasi, & konsisten. 	<p>Karakteristik kualitatif didefinisikan sebagai ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.</p> <p>Ukuran-ukuran normatif tersebut:</p> <p>1. Relevan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Feedback value</i> b. <i>Predictive value</i> c. Tepat waktu d. Lengkap <p>1. Andal</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyajian jujur b. Dapat diverifikasi c. Netralitas <p>2. Dapat dibandingkan</p> <p>3. Dapat dipahami</p>

Keterandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Sedangkan ketepatanwaktuan (*timeliness*) adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. Dalam hal tertentu, ketepatanwaktuan untuk mencapai kebermanfaatan harus dibarengi dengan mengorbankan kualitas lain yaitu keakuratan/presisi (*accuracy/precision*) atau keterandalan. Jadi terdapat saling mengorbankan (*trade-off*) antara ketepatanwaktuan dan keterandalan/reliabilitas untuk mendapatkan kebermanfaatan. Namun, walaupun berkurangnya reliabilitas berakibat berkurangnya kebermanfaatan, dimungkinkan untuk mempercepat ketersediaan data secara aproksimasi tanpa mempengaruhi reliabilitas secara material. Dengan begitu ketepatanwaktuan dengan aproksimasi justru akan meningkatkan kebermanfaatan secara keseluruhan (Suwardjono, 2005).

4. Pengendalian Intern Akuntansi

Pengendalian internal adalah suatu proses, yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: efektivitas dan efisiensi operasi, kehandalan pelaporan keuangan dan ketaatan pada peraturan serta perundangan yang berlaku. (Standar Profesional Akuntan Publik, SA Seksi 319).

Pengendalian intern yang lemah menyebabkan tidak dapat terdeteksinya kecurangan/ketidakkuratan proses akuntansi sehingga bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi menjadi tidak kompeten. (Noviyanti, 2004).

Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metoda dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keterandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. (Mulyadi, 2005). Menurut tujuannya, pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua yaitu pengendalian intern akuntansi (*internal accounting control*) dan pengendalian intern administratif (*internal administrative control*). Pengendalian intern akuntansi atau pengendalian akuntansi yang merupakan bagian dari pengendalian intern yang berkaitan dengan tujuan menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keterandalan data akuntansi. Sedangkan pengendalian intern administratif berkaitan dengan tujuan mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Wilkinson *et al.*, (2000) menyebutkan subkomponen dari aktivitas pengendalian yang berhubungan dengan pelaporan keuangan adalah (1)

perancangan yang memadai dan penggunaan dokumen-dokumen dan catatan-catatan bernomor; (2) pemisahan tugas; (3) otorisasi yang memadai atas transaksi-transaksi; (4) pemeriksaan independen atas kinerja; dan (5) penilaian yang sesuai/tepat atas jumlah yang dicatat.

Unsur-unsur pokok yang diperlukan dalam menciptakan pengendalian akuntansi yang efektif antara lain (Wahana Komputer, 2003): (a) adanya perlindungan fisik terhadap harta; (b) pemisahan fungsi organisasi yaitu pemisahan fungsi organisasi yang saling berkaitan; (c) adanya jejak audit yang baik; dan (d) sumber daya manusia yang optimal.

Mahmudi (2007) menyebutkan komponen penting yang terkait dengan pengendalian intern akuntansi antara lain sebagai berikut:

- a) Sistem dan prosedur akuntansi.
Sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian tahap dan langkah yang harus dilalui dalam melakukan fungsi tertentu. Sistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerah paling sedikit meliputi (pasal 98 PP Nomor 58 tahun 2005): (1) sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas; (2) sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas; (3) sistem dan prosedur akuntansi aset; dan (4) sistem dan prosedur akuntansi selain kas.
- b) Otorisasi.
Otorisasi dalam sistem akuntansi pemerintah daerah sangat penting karena tanpa sistem otorisasi yang baik, maka keuangan daerah sangat berisiko untuk terjadi kebocoran. Sistem otorisasi menunjukkan ketentuan tentang orang atau pejabat yang bertanggung jawab mengotorisasi suatu transaksi yang terjadi di pemerintah daerah. Otorisasi tersebut bisa berbentuk kewenangan dalam memberikan tanda tangan pada formulir dan dokumen tertentu. Tanpa otorisasi dari pihak yang berwenang maka transaksi tidak dapat dilakukan, atau walaupun ada transaksi tanpa otorisasi maka transaksi tersebut dikategorikan tidak sah atau ilegal.
- c) Formulir/dokumen dan catatan.
Setiap transaksi yang terjadi di pemerintah daerah harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah. Selain terdapat bukti yang valid dan sah, transaksi tersebut harus dicatat dalam buku catatan akuntansi. Kelengkapan formulir/dokumen transaksi serta catatan akuntansi sangat penting dalam proses audit keuangan.
- d). Pemisahan tugas.
 - e). Fungsi-fungsi atau pihak-pihak yang terkait dalam suatu transaksi dalam suatu transaksi harus dipisahkan. Suatu transaksi dari awal hingga akhir tidak boleh ditangani oleh satu fungsi atau satu orang saja. Harus dipisahkan antara fungsi pencatat uang serta pengotorisasi. Harus dilakukan pemisahan tugas

secara tegas dengan deskripsi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang jelas dalam rangka menghindari terjadinya kolusi, kecurangan dan korupsi.

Penelitian Ashbaugh *et al.* (2006) menjelaskan bahwa pentingnya pengungkapan pengendalian internal untuk menyelidiki faktor ekonomi yang mengungkapkan kegagalan resiko pengendalian internal dan insentif manajemen untuk meneliti dan melaporkan.

Penelitian Dinata (2004) menemukan bukti empiris bahwa secara garis besar sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintahan Kota Palembang belum sepenuhnya dinyatakan siap atas berlakunya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002.

Penelitian Alimbudiono dan Fidelis (2004) memberikan temua empiris bahwa pegawai berlatar pendidikan akuntansi di sub bagian akuntansi Pemerintahan masih minim, *job description*-nya belum jelas, dan pelatihan-pelatihan untuk menjamin fungsi akuntansi berjalan dengan baik belum dilaksanakan.

Kegiatan lokakarya eksplorasi pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara yang dilaksanakan pada tahun 2003 berhasil mengidentifikasi permasalahan sumber daya manusia dalam tiga tingkatan yaitu tingkat sistem, lembaga dan individu. Hasil perangkan dari permasalahan tersebut menetapkan urutan prioritas penanganan yang pertama adalah penempatan pegawai kurang sesuai dengan bidang ilmu yang berdampak pada rendahnya pemahaman aparatur terhadap tugas dan fungsinya. Selain itu terkait dengan sumber daya manusia di satuan kerja di Indonesia, sebuah tulisan di Media Indonesia (9 Desember 2006) menyebutkan bahwa dari 19.670 satuan kerja, hanya empat orang akuntannya.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintahan masih belum memadai. Kapasitas sumber daya manusia yang masih minim ini mungkin memiliki pengaruh terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah. Hal kedua yang mungkin mempengaruhi keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah adalah pemanfaatan teknologi informasi.

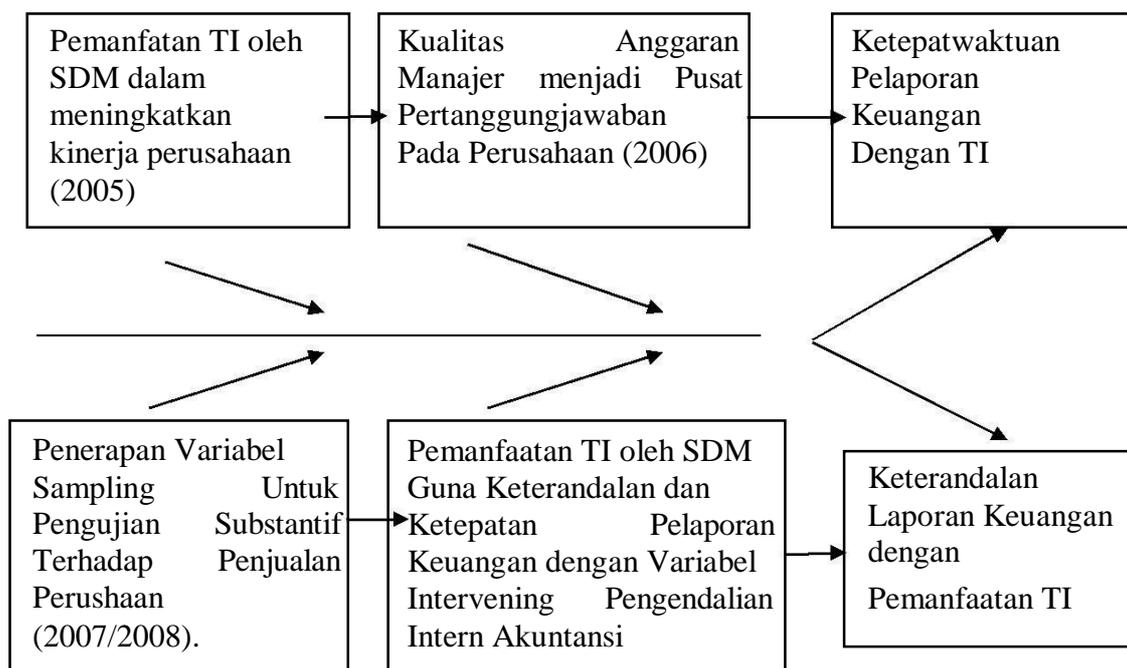
Telah diketahui bahwa total volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Dari sisi akuntansi hal tersebut menunjukkan bahwa volume transaksi keuangan pemerintah juga menunjukkan kuantitas yang semakin besar dan kualitas yang semakin rumit dan kompleks. Peningkatan volume transaksi yang semakin besar dan semakin kompleks harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah (Sugijanto, 2002). Oleh karena itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan

daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah.

Suatu teknologi informasi terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, manajemen data dan jaringan (Wilkinson *et al*, 2000). Meskipun secara umum telah banyak diketahui manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, *cost* pemrosesan yang lebih rendah, kemampuan *multiprocessing* (Wahana Komputer, 2003), namun pengimplementasian teknologi informasi tidaklah murah. Terlebih jika teknologi informasi yang ada tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara maksimal maka implementasi teknologi menjadi sia-sia dan semakin mahal. Kendala penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada dan keterbatasan dana. Kendala ini yang mungkin menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum optimal. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi ini mungkin juga memiliki pengaruh terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah. Sistem akuntansi sebagai sistem informasi merupakan subyek terjadinya kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Oleh karena itu sistem akuntansi memerlukan pengendalian intern atau sistem akuntansi berkaitan erat dengan pengendalian intern organisasi (Mahmudi, 2007).

Pengendalian intern menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan.

f). Road Map



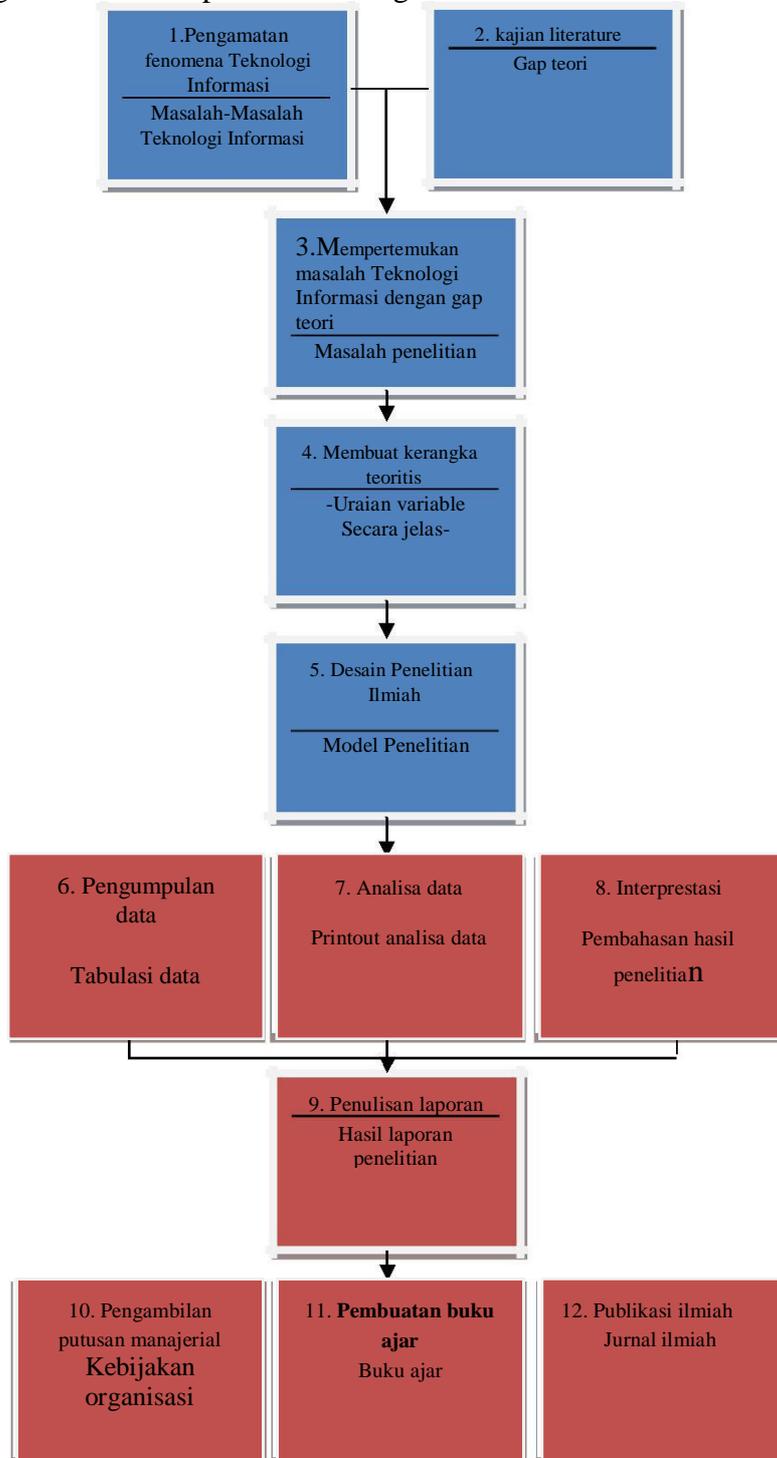
Keterangan :

Penelitian tersebut diatas berdasarkan kurun waktu tahun dari 2005, 2006, 2007, 2008, hingga 2012 terdapat keterkaitan antara penelitian tahun sebelumnya dan sesudahnya hingga penelitian yang akan dilaksanakan tahun depan. Keterkaitan tersebut ditunjukkan oleh anak panah, dimana sampai pada penelitian tahun yang terakhir 2012, semua bertujuan untuk peningkatan pemanfaatan TI untuk ketepatan waktu dan keterandalan pelaporan keuangan.

3. Metodologi Penelitian

1. Bagan Alir Penelitian.

Untuk memahami alur penelitian mulai dari awal sampai selesai dapat digambarkan alur penelitian sebagai berikut:



2. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel

Populasi dari Penelitian ini adalah bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada SKPD di Pemerintah Daerah Surakarta. Sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive/judgement sampling*. *Purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti (Sekaran, 2006). Kriteria responden dalam penelitian ini adalah para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan pada SKPD. Responden dalam penelitian ini adalah yaitu kepala dan staf subbagian akuntansi/penatausahaan keuangan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data akan dilakukan melalui survai kuesioner yang diantar dan diambil sendiri oleh peneliti terhadap bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD ini meliputi dinas, badan dan kantor. Jumlah kuesioner yang dikirim kepada responden sebanyak 50 kuesioner. Lokasi penelitian terbatas di Surakarta.

4. Definisi Operasional

Masing-masing variabel diukur dengan model skala likert lima point, yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Ragu-ragu, (4) Setuju, dan (5) Sangat Setuju. Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi mereka yang sesungguhnya.

Variabel :

a. Sumber Daya Manusia.

Kemampuan baik dalam tingkatan individu, organisasi /kelembagaan, maupun sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. (GTZ & USAID/CLEAN Urban, 2001).

b. Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi. (Jurnali & Supomo, 2002)

c. Pengendalian Intern Akuntansi.

Bagian dari pengendalian intern akuntansi yang meliputi rencana organisasi, prosedur dan catatan yang dirancang untuk menjaga keterandalan data akuntansi. (Standar Profesional Akuntan Publik, SA Seksi 319).

Nilai informasi keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. **Keterandalan** adalah kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. (Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005). **Ketepatanwaktuan** yaitu tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. (Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005).

5. Pengujian Hipotesis

a. Pengujian Data :

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas menggunakan analisis faktor dengan tujuan untuk mengetahui kevalidan butir-butir pertanyaan untuk masing-masing variabel atau untuk mengetahui validitas konstruk (Chenhall & Morris, 1986). Asumsi yang mendasari dapat tidaknya digunakan analisis faktor adalah data matrik harus memiliki korelasi yang cukup (*sufficient correlation*). Alat uji yang digunakan untuk mengukur tingkat interkorelasi tersebut adalah *Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy* (KMO MSA). Masing-masing instrumen harus memiliki nilai KMO MSA (*Measure of Sampling Adequacy*) lebih dari 0.50 sehingga data yang dikumpulkan dapat dikatakan tepat untuk analisis factor (Hair *et al.*, 2006).

Uji reliabilitas dilakukan dengan cara menghitung nilai *Alpha* dari *Cronbach* dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Nilai *cut off* untuk menentukan reliabilitas suatu instrumen adalah nilai *Alpha* dari *Cronbach* lebih dari 0.60 (Anton Sukarno, 2012)

b. Pengujian *Path Analysis* dengan *Structural Equation Modeling* (SEM):

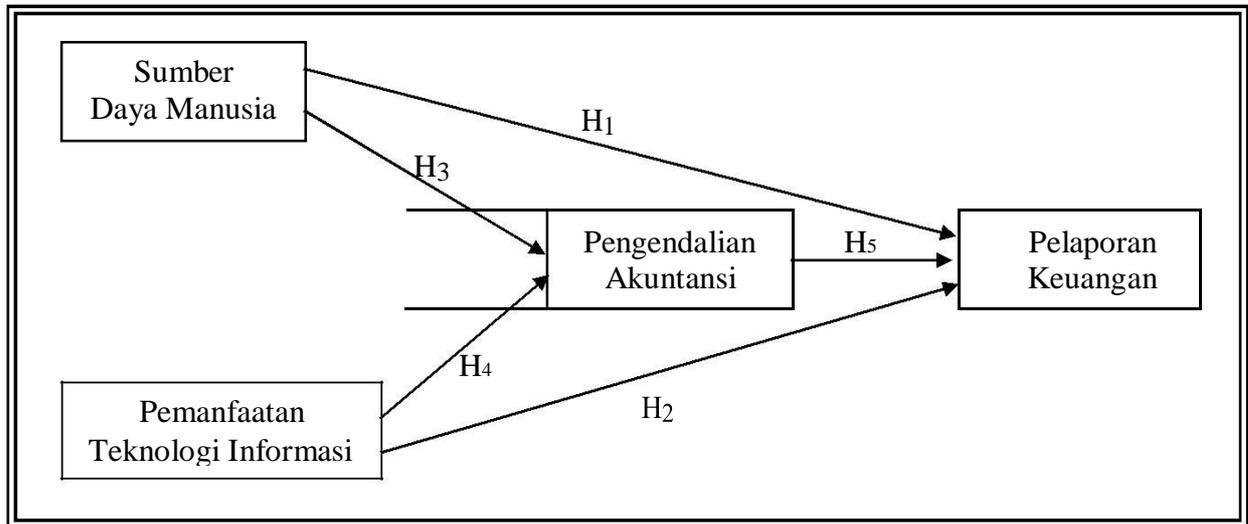
Langkah-langkah dalam mengaplikasikan SEM adalah sebagai berikut:

- 1). Penentuan konstruk individu
- 2). Penyusunan dan spesifikasi dari ukuran model
- 3). Desain studi untuk mendapatkan hasil empiris
- 4). Melakukan taksiran terhadap validitas ukuran model
- 5). Spesifikasi struktur model
- 6). Melakukan taksiran terhadap validitas model (Efferin, 2008)

6. Model Penelitian

Gambar berikut menyajikan model mengenai hubungan antara sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi dengan variabel intervening pengendalian intern akuntansi akan menghasilkan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah yaitu meliputi keterandalan dan ketepatanwaktuan, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.5.1.
Model hubungan SDM dan Pemanfaatan TI dengan
Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi terhadap
Pelaporan Keuangan



Sumber : Hasil Konstruksian Peneliti

Keterangan:

Gambar 3.5.1. menjelaskan bahwa H₁ menunjukkan hubungan antara sumber daya manusia terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah melalui pengendalian intern akuntansi, H₂ menunjukkan hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, H₃ menunjukkan hubungan antara sumber daya manusia terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, H₄ menunjukkan hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dan H₅ menunjukkan hubungan antara pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

7. Target Luaran

Penelitian ini mempunyai target luaran sebagai berikut:

- a. Penelitian ini membuktikan bahwa peningkatan sumber daya manusia yang dimiliki baik pada tingkatan sistem, kelembagaan maupun individu didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin serta adanya rancangan pengendalian intern akuntansi yang memadai diharapkan pihak pengelola keuangan daerah bagian akuntansi mampu melaksanakan tugas dan

- b. fungsi akuntansi dengan baik yang akhirnya menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang andal dan tepat waktu.
- c. Penelitian ini juga membuktikan bahwa keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi. Sedangkan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi.
- d. Model yang dikonstruksi dalam penelitian ini merupakan model kompilasi yang diuji dengan prosedur yang *rigid* sehingga keakuratan prediksinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- e. Metode riset yang dikembangkan dalam penelitian ini berlatar belakang isu-isu pokok akuntansi seperti standar dan perlakuan akuntansi yang berasal dari fakta bahwa sektor publik dipaksa untuk mengadopsi praktek pelaporan keuangan yang hampir identik dengan yang digunakan oleh sektor swasta, dan juga masalah organisasional yang muncul karena keterbatasan sumber daya dan pengetahuan. Hal ini yang diperkirakan menjadikan penelitian ini mempunyai keunikan yang dapat memberikan perspektif yang berbeda dalam penelitian-penelitian di bidang akuntansi sektor publik.
- f. Model yang dikembangkan dalam penelitian ini mengisyaratkan terdapatnya isu tanggungjawab pelaporan keuangan pemerintah daerah yang diekspresikan melalui hubungan antar variabel yang didesain dalam model yang berimplikasi pada pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Melalui penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman tentang sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan adanya rancangan pengendalian intern akuntansi yang memadai mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik yang akhirnya bermuara pada dihasilkannya laporan keuangan pemerintah daerah yang andal dan tepat waktu.

8. Indikator Capaian Yang Terukur

a. Uji Validitas

Uji validitas bertujuan mengetahui ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu instrumen dianggap memiliki validitas tinggi jika dapat memberikan hasil pengukuran yang sesuai dengan tujuannya. Pengujian validitas meliputi validitas konvergen dan validitas diskriminan yang dilihat dari *factor loading* (Malhotra, 1993). Validitas konvergen mengindikasikan kemampuan indikator dalam mengukur konstruk yang diukurnya dan ditunjukkan oleh nilai *factor loading* yang relatif besar, sedangkan validitas diskriminan mengindikasikan ketidakmampuan

indikator dalam mengukur konstruk yang harus diukurnya yang ditunjukkan oleh nilai *factor loading* yang relatif kecil.

Dalam penelitian ini, analisis faktor merupakan metode statistik yang dianggap relevan untuk pengujian validitas data penelitian (Malhotra, 1993). Pengujiannya didasarkan pada suatu asumsi bahwa semua variabel yang dianalisis adalah independen yang merupakan fungsi dari suatu faktor atau variabel laten.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas juga merupakan prosedur pengujian statistik yang dianggap relevan untuk mengukur sejauh mana keterhandalan atau konsistensi internal dari suatu instrumen penelitian. Untuk mengetahui keterhandalan ini dapat dijelaskan melalui koefisien *Cronbach's alpha* yang diperoleh. Suatu instrumen dikatakan reliabel atau handal, bilamana hasil nilai *Cronbach's alpha* nya diperoleh melebihi 0,7 (Malhotra, 1993; Hair *et al.*, 1998). Dengan demikian, prosedur pengujian ini dapat memberikan jaminan bahwa datanya memenuhi kriteria kelayakan untuk dianalisis dengan menggunakan metode-metode statistik yang lain.

c. Uji *Path Analisis* atau Analisis Jalur

Dalam penelitian ini, untuk mengevaluasi hubungan antara sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan memilih pengendalian intern akuntansi sebagai variabel intervening.

Variabel intervening merupakan variabel antara atau *mediating* yang fungsinya memediasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen (Tuckman, 1988). Untuk menguji pengaruh variabel intervening digunakan metode analisis jalur atau *path analysis*. *Path Analisis* menguji beberapa variabel exogen (independen) dan endogen (dependen) yang sekaligus memungkinkan pengujian terhadap variabel intervening atau variabel antara. *Path Analisis* memberikan secara eksplisit hubungan kausalitas antar variabel berdasarkan pada teori (Ghozali, 2005). Dalam penelitian ini, data diolah dengan menggunakan *Analysis Moment Of Structures* atau AMOS versi 16.0.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriansyah. 2006. *Local Financial Information Systems. Makalah Training Budget Performance Capacity Building for Effective Public Finance.*
- Alimbudiono, Ria Sandra & Fidelis Arastyo Andono. 2004. Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah “XYZ” dan Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kepada Masyarakat: Renungan Bagi Akuntan Pendidik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*. Vol. 05 No. 02. Hal. 18–30.
- Anonim. Tinjauan Pustaka. www.yahoo.com
- ANTARA News. 7 Agustus 2007. Wapres Akui Pemanfaatan TIK Belum Maksimal.
- Astuti Sri. 2001. Ketidakpastian Tugas Sebagai *Variabel Moderating Terhadap Hubungan Antara Kemanfaatan Teknologi Informasi dan Kepuasan Pemakai Pada Und-user Computing*. Tesis. Universitas Gadjah Mada.
- Ashbaugh S, Collins D & Kinney W. 2007. *The Discovery and Reporting of Internal Control Deficiencies Prior to Sox-Mandated Audits*. *Journal of Accounting and Economics*, forthcoming. <http://ssrn.com/abstract694681>. 23 Juli 2007.
- Auditor-Contoller County of Yoo Departemen. Februari, 2005. *Internal Control Questionnaire*.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2006. Konsep Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
- Benedicta Dhias A.N.S, Ronny Prabowo & Intiyas Utami. 2008. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal: Studi Empiris Pada PDAM yang Diaudit Oleh BPK. *Accounting Conference, Doctoral Colloquium and Accounting Workshop*. Jakarta.
- Bharadwaj. 1999. *A Resource-based Perspective on Information Technology Capability and Firm Performance: An Empirical Investigation*, MIS Quarterly.

- Bharadwaj & Konsynski. 1999. *Information Technology Effects on Firm Performance as Measured by Tobin's*. Management Science.
- BUMN Go Public. 23 Juli 2007. Laporan Hasil Penelitian Kesiapan BUMN Go Public Terhadap Pelaporan Sistem Pengendalian Internal.
[Hhttp://www.bpkp.go.id/index.php?idpage=596&idunit=48](http://www.bpkp.go.id/index.php?idpage=596&idunit=48).
- Cohen, Sandra. February, 2007. *Assessing It As A Key Success Factor For Accrual Accounting Implementation In Greek Municipalities*. Journal of Financial Accountability & Management.
- Cooper, Donald R. & Pamela S. Schindler. 2003. *Business Research Method*. Eight Edition. Mc Graw Hill.
- Dinata&Anton Mulhar. 2004. Tinjauan Atas Kesiapan SDM pada Instansi Pemerintah Kota Palembang dalam Penerapan Akuntansi Daerah Menuju Terciptanya *Good Governance* di Era Otonomi Daerah. Skripsi, Universitas Sriwijaya, Indralaya.
- Doyle J, W. Ge & Mc Vay. 2006. *Determinants of Weaknesses in Internal Control Over Financial Reporting*. Journal of Accounting and Economics.
- Efferin, Sujoko. 2008. Metode Penelitian Akuntansi: Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Edisi Pertama. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ellyana, Denovita. Achyar Redy & Ardi Hamzah. 2008. Variabel Anteseden & Konsekuensi Pemanfaatan Sistem Informasi (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten di Pulau Madura). *Accounting Conference, Doctoral Colloquium and Accounting Workshop*. Jakarta.
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. 2006. *Standar Akuntansi Pemerintahan: Telaah Kritis PP Nomor 24 Tahun 2004*. BPFE, Yogyakarta.
- Gujarati, Damodar N. 2003. *Basic Econometrics*. McGraw-Hill, Inc. New York.
- Gozali, Imam. 2004. Konsep dan Aplikasi dengan Program AMOS 16.0. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

- Hair, J.F., Black, William C. Babin, Barry J. Anderson, Roplh E. Tatham, & Ronald L. 2006. *Multivariate Data Analysis*. Sixth Edition. Upper Saddle River, Prentice Hall International, Inc.
- Hamzah, Ardi. 2009. Pengaruh Ekspektasi Kinerja, Ekspektasi Usaha, Faktor Sosial, Kesesuaian Tugas dan Kondisi yang Memfasilitasi Pemakai terhadap Minat Pemanfaatan Sistem Informasi (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten di Pulau Madura). Simposium Nasional Sistem Teknologi Informasi. UGM.
- Hevesi, G. Alan. 2005. *Standards for Internal Control in New York State Government*. www.osc.state.ny.us
- Imelda. 2005. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIKAD) Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Skripsi, Universitas Sriwijaya, Indralaya.
- Indriasari, Desi. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. SNA XI. Pontianak.
- Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan RI. 2005. Kelemahan Desain dan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal. www.itjen.depkeu.go.id.
- , 2006. Peran Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan terkait dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). www.itjen.depkeu.go.id.
- Jurnali, Teddy & Bambang Supomo. 2002. Pengaruh Faktor Kesesuaian Tugas Teknologi dan Pemanfaatan TI Terhadap Kinerja Akuntan Publik. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol. 5 No.2 Hal. 214-228.
- Mahmudi. 2007. Analisis Laporan Keuangan Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik. UPP STIM YKPN.

- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana *Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 2 No.1, Hal 1-17.
- Mas'ud, Fuad. 2004. Survei Diagnosis Organisasional: Konsep & Aplikasi. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muhammad, Fadel & Nurlan Darise. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik). PT Indeks Jakarta.
- Media Indonesia. 9 Desember 2006. Sistem Akuntansi Pemerintah Lemah.
- Noviyanti, Suzy & Intiyas Utami. 2004. Dasar-dasar Pengauditan. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.
- Pikiran Rakyat. 27 April 2007. DPRD Kemungkinan Panggil Gubernur: Dipertanyakan Ketidaksesuaian LPJ.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Riasetiawan, Mardhani. 2007. Tinjauan Teoritis Sistem Informasi Akuntansi. www.google.com.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. 4 rd Edition, John Wiley & Sons, Inc.
- Suara Karya. 17 Desember 2005. BPK Baru Audit 80 Persen APBD.
- Sugijanto. 2002. Peranan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Implikasi UU No. 22/25 Tahun 1999. Lintasan Ekonomi. Volume XIX Nomor 1. Hal 50-66.

- Suardjono. 2005. Teori Akuntansi: Perencanaan Pelaporan Keuangan. Edisi Ketiga. BPFE, Yogyakarta.
- Sukarno Anton, 2012, Penilaian Pendidikan Berbasis Kompetensi, Edisi Kesatu IKIP PGRI Press, Semarang.
- Tim *GTZ-Support for Decentralization Measures / P4D*. Mei, 2005. Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Jilid II : Sumber Daya Manusia Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah.
- Triyuwono, Iwan & Roekhudin. 2000. Konsistensi Praktik Sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas pada Lazis (Studi Kasus di Lazis X Jakarta). *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol. 3 No. 2 Hal. 151-167.
- Wahana Komputer. 2003. Panduan Aplikatif Sistem Akuntansi Online Berbasis Komputer. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Wilkinson, W. Joseph, Michael J. Cerullo, Vasant Raval & Bernard Wong-On-Wing. 2000. *Accounting Information Systems: Essential Concepts and Applications*. Fourth Edition. John Wiley and Sons. Inc.
- World Bank. Maret, 2007. Pengelolaan Keuangan Publik di Aceh: Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah di Aceh.
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Pengendalian Internal](http://id.wikipedia.org/wiki/Pengendalian_Internal). 27 Februari 2008.
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Badan Usaha Milik Negara](http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Usaha_Milik_Negara)
- <http://en.wikipedia.org/wiki/COSO>

